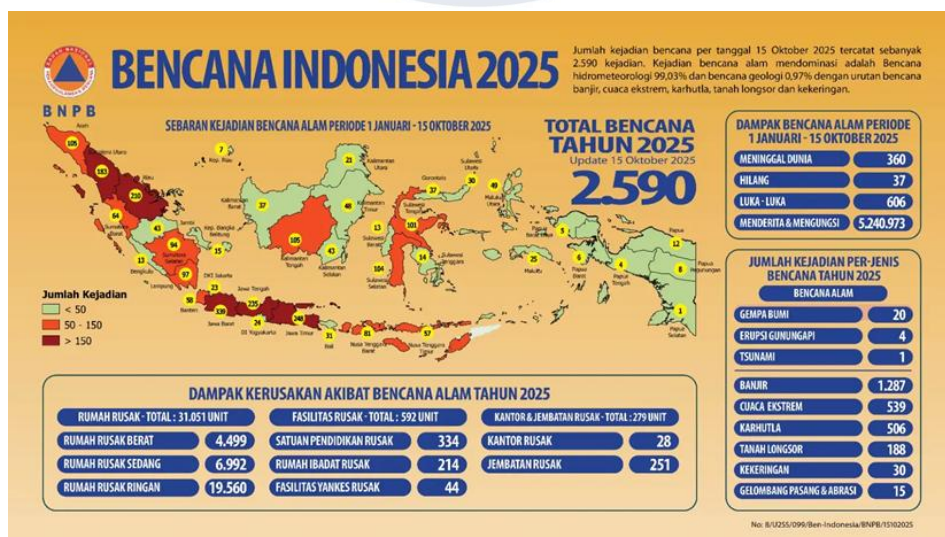


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang cukup panjang dan memiliki keindahan alam yang memanjakan mata. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak pulau dengan keanekaragaman flora dan fauna yang diakui dunia, namun dibalik itu terdapat bahaya yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia (Riswandi, 2025). *World Risk Report* (WRR) tahun 2025 mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada tingkat ketiga setelah Filipina dan India mengenai risiko bencana alam tertinggi di dunia dengan skor risiko 39.80 dari 100 (Frege et al., 2025). Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 telah terjadi 3.472 kasus bencana dengan korban sebanyak 540 jiwa meninggal dunia, 8.136.271 jiwa menderita dan mengungsi, serta kerusakan infrastruktur dengan total 81.947 unit (Bagaskoro et al., 2025).



Gambar 1. 1 Infografis Bencana Tahun 2025

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2025)

Pada tahun 2025 saja, Indonesia masih dilanda bencana dan insiden yang merenggut korban jiwa. Sebanyak 2.590 kejadian bencana telah terjadi dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh bulan dalam tahun 2025. Menurut Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), total jatuhnya korban jiwa sebanyak 360 jiwa dan 37 korban hilang serta 606 luka-luka, sementara 5.240.973 jiwa terdampak bencana dan terpaksa mengungsi (PDSI Pusdatinkom, 2025). Meskipun angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat serta pemerintah masih tergolong besar. Total kerugian akibat banjir di daerah Jakarta dan sekitarnya pada awal Maret sendiri berjumlah sebesar Rp. 1.699.670.076.814,- triliun rupiah, kerugian ini belum termasuk kerugian material dari bencana lain yang terjadi selama tiga bulan pertama tahun 2025 (Muhari et al., 2025).



Gambar 1. 2 Reruntuhan Masjid di Kecamatan Pidie Jaya Pasca Gempa

Sumber: BBC Indonesia (2016)

Kegagalan struktur bangunan juga terjadi dalam beberapa insiden gempa di Indonesia, contohnya saat kejadian gempa bumi yang menerjang Aceh pada tahun 2016, beberapa bangunan yang berlokasi di Kabupaten Pidie Jaya runtuh akibat bencana gempa bumi berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) (Idham Kholid, 2016). Bangunan yang hancur sebagian besar adalah bangunan besar seperti masjid, ruko, serta bangunan bertingkat lainnya. Taufiq Saidi selaku pakar konstruksi yang berasal dari Universitas Syiah Kuala memberikan keterangan bahwa beberapa bangunan yang hancur memiliki konstruksi yang tidak sesuai, seperti terlalu banyak campuran air dalam beton dan lain-lainnya (Jerome Wirawan & Haryo Wirawan, 2016).



Gambar 1. 3 Reruntuhan Kantor Gubernur Sulawesi Barat

Sumber: Metro TV (2021)

Kejadian serupa juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan saat terjadi bencana gempa bumi pada tanggal 15 Januari tahun 2021 (Lukman Diah Sari, 2026). Gempa bumi berkekuatan M6,2 mengguncang daerah Majene dan menyebabkan kerusakan pada bangunan, namun bangunan yang rusak tidak tersebar dengan merata. Iswandi Imran selaku guru besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB mengungkapkan bahwa kerusakan bangunan dipengaruhi oleh faktor konstruksi bangunan yang tidak mengikuti standar bangunan Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2002 (CNBC Indonesia, 2021).

Jika kita berkaca pada peristiwa bencana dan total kerugian sepanjang tahun 2025 yang terjadi di Indonesia, banyak hal mengindikasikan bahwa Indonesia masih perlu mengevaluasi mitigasi bencana, perencanaan tata kelola ruang, serta memberikan sosialisasi mengenai risiko bencana yang ada dalam lingkungan masyarakat (Pusat Studi Gempa Nasional, 2025). Masih banyak masyarakat tidak mengetahui dan menyalahartikan bahaya, risiko, dan dampak yang dihadapi sebelum, ketika, serta setelah bencana terjadi (Gattinger, 2023).

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh bencana bisa berakibat fatal dan menimbulkan korban lebih banyak dari sebelumnya jika tidak diatasi dengan baik. Hal ini dapat dihindari dengan menggunakan teknik dan penerapan *disaster risk reduction* (DRR) (Heinkel et al., 2025). *Disaster risk reduction* (DRR) sendiri merupakan sebuah istilah yang sering digunakan baik dalam lingkup internasional maupun nasional dalam hal

bencana. Istilah ini mengacu pada upaya untuk mengurangi risiko bencana yang sudah ada serta mencegah timbulnya bencana baru (UNDRR, 2017). *Disaster Risk Reduction* (DRR) sangat penting diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis Indonesia yang menantang membuat ancaman mengenai bencana cukup besar sehingga dibutuhkan upaya untuk mereduksi risiko bencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Disaster Risk Reduction (DRR) sudah lama diadopsi dan diteliti oleh banyak negara, Jepang melalui konferensi *United Nations* dengan negara-negara lain membentuk *Hyogo Framework* pada tahun 2005 (Mujahidin & Murdani, 2024). *Framework* ini berisi mengenai langkah dan penerapan untuk mencapai *disaster risk reduction* pada negara-negara yang tergabung dalam *United Nations*. Pada akhirnya *Hyogo Framework* ini pada tahun 2015 resmi digantikan oleh *Sendai Framework*, hal ini terjadi akibat banyak faktor pada *framework* sebelumnya yang tidak diperhitungkan dan justru menambah kerugian secara materi dan immaterial. Negara-negara *United Nations* selain Jepang juga menganggap serius mengenai *disaster risk reduction*, hal ini didukung dengan adanya divisi atau cabang dari *United Nations* yang secara khusus membahas mengenai pengurangan risiko bencana yaitu *United Nation for Disaster Risk Reduction* (UNDRR).

Namun dalam penerapannya, *disaster risk reduction* sering dihambat oleh kurangnya literasi mengenai hal tersebut, kurangnya kapital untuk membangun infrastruktur, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan geografi yang cukup menantang (Bhandari et al., 2025). Hambatan inilah yang membuat kebijakan mengenai *disaster risk reduction* menjadi sulit dilaksanakan, terlebih dalam situasi bencana. Maka dari itu dibutuhkan komunikasi risiko yang efektif dari instansi yang berkaitan dengan bencana agar masyarakat mengetahui bahaya dan dapat melindungi diri ketika bencana terjadi.

Komunikasi risiko sendiri merupakan gabungan dari aksi komunikasi yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Bhandari et al., 2025). Komunikasi risiko sangat berguna dalam menyebarkan informasi mengenai risiko bencana dan bagaimana cara menghadapi risiko tersebut (Stewart, 2024). Komunikasi mengenai risiko bencana di Indonesia

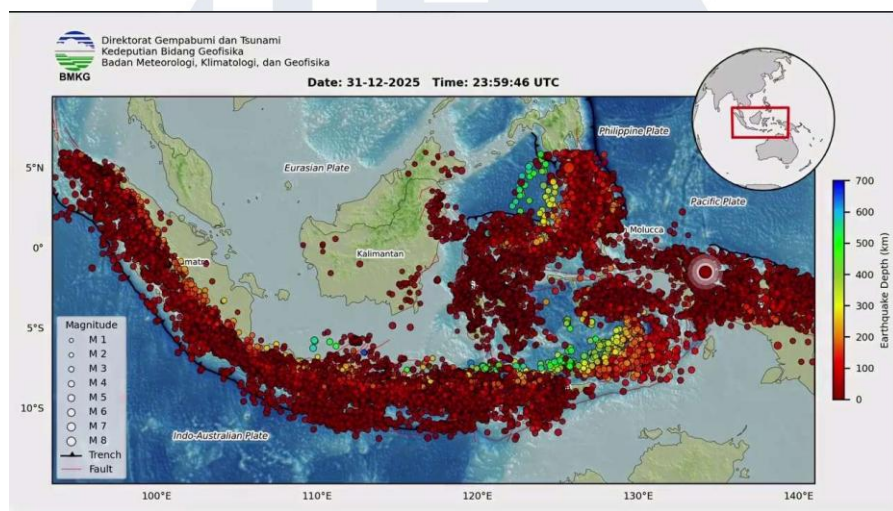
masih memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Contohnya negara Jepang, mereka sudah belajar dari pengalaman pahit dan sadar bahwa mereka harus mempersiapkan masyarakat agar dapat bertahan dalam situasi bencana (Pawlik et al., 2024).

Hal ini menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dan dapat menghadapi risiko bencana dengan siap. Ini menjadi salah satu keuntungan dalam situasi bencana, karena risiko yang mengancam keselamatan korban menurun jika terjadi bencana. Selain itu masyarakat sudah dapat mengambil tindakan sesuai dengan arahan saat komunikasi risiko bencana kepada masyarakat dijalankan (Stewart, 2024). Dengan komunikasi risiko mengenai bencana yang efektif, serta kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah tepat, maka hal ini dapat mengurangi risiko serta mengurangi korban secara material maupun immaterial, dengan begitu risiko bencana dapat dikurangi (Rafliana et al., 2022).

Komunikasi risiko terus berkembang dari masa ke masa, pada tahun 2002 CDC mengeluarkan konsep *Crisis and Emergency Risk Communication* (CERC) yang berlandaskan teori komunikasi risiko dan komunikasi krisis. CERC sendiri dikembangkan pasca peristiwa terorisme 9/11 yang pada saat itu menghancurkan gedung ikonik Amerika, *World Trade Center* 1 dan 2. Maka urgensi untuk membuat sebuah panduan untuk mengkomunikasikan risiko di Amerika menjadi tinggi setelah peristiwa tersebut (Bourrier & Bieder, 2018). Konsep ini dikembangkan untuk membantu lembaga-lembaga untuk menyampaikan informasi saat situasi krisis. Konsep CERC pada akhirnya diadopsi oleh banyak lembaga di luar negara Amerika untuk menangani situasi krisis seperti bencana, aksi terorisme, kecelakaan kerja, serta mengurangi risiko bencana ketika krisis terjadi.

Risiko bencana di Indonesia cukup tinggi dengan ancaman bencana di Indonesia bisa datang dengan tiba-tiba, maka dari itu sangat diperlukan kesiapan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana (Rafliana et al., 2022). Salah satu ancaman tersebut yang dapat terjadi secara tiba-tiba adalah bencana gempa bumi (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2018).

Gempa bumi merupakan sebuah fenomena alam yang sering terjadi, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang tepat di atas area cincin api (*ring of fire*) (Riswandi, 2025). Menurut data dari BMKG, sepanjang tahun 2025 telah terjadi setidaknya 43.439 aktivitas seismik di Indonesia. Aktivitas gempa yang paling tinggi tercatat terjadi bulan Agustus dengan jumlah 4.071 kali, dengan puluhan gempa dengan intensitas tinggi dan menyebabkan kerusakan material maupun immaterial (Saifullah, 2026).



Gambar 1. 4 Peta Seismisitas Indonesia 2025

Sumber: Instagram infobmkg

Indonesia pernah beberapa kali dilanda bencana gempa bumi akibat sesar aktif, bencana yang belum lama terjadi adalah gempa Cianjur pada tahun 2022. Gempa di Cianjur pada tanggal 21 November 2022 berkekuatan 5,6 Magnitudo yang menyebabkan banyak rumah hancur akibat guncangan gempa tersebut (Rozar Putratama, 2022). Menurut BNPB, gempa ini menyebabkan 602 kehilangan nyawa serta 114.683 harus mengungsi serta menyebabkan 16 kecamatan dan 180 desa terdampak. BNPB mencatat sekitar 67.504 rumah, 701 fasilitas pendidikan, 18 unit kantor/gedung, 281 fasilitas ibadah, serta 18 unit fasilitas kesehatan mengalami kerusakan (BNPB, 2023). Gempa Cianjur merupakan salah satu gempa yang cukup merusak sarana fasilitas penunjang kehidupan masyarakat serta menimbulkan korban yang cukup banyak pada tahun 2022.



Gambar 1. 5 Kerusakan Gempa Cianjur 2022

Sumber: Detik.com (2022)

Kerusakan parah akibat gempa bisa terjadi akibat ketidaksiapan baik dari pemerintah daerah serta lembaga pendukung lainnya. Selain itu ada faktor masyarakat yang tidak terinformasi risiko dan bahaya yang bisa terjadi, maka dari itu komunikasi risiko menjadi salah satu kunci dalam *disaster risk reduction*. Komunikasi risiko dalam setiap negara dapat berbeda-beda, karena komunikasi tersebut bergantung kepada kebijakan dan strategi mengenai komunikasi bencana yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya yang ada pada negara tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengungkapkan strategi komunikasi risiko yang dilakukan BMKG dalam mengatasi bencana gempa bumi dan tsunami.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskanlah masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi komunikasi risiko BMKG dalam memberikan informasi bencana gempa bumi kepada masyarakat?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana strategi komunikasi resiko BMKG dalam memberikan informasi bencana gempa bumi kepada masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis bertujuan mengetahui strategi komunikasi resiko BMKG dalam memberikan informasi bencana gempa bumi kepada masyarakat.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan komunikasi risiko bencana di Indonesia. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya komunikasi risiko dalam penanganan bencana khususnya gempa bumi. Hasil dari penelitian ini juga berguna untuk melihat seberapa jauh perkembangan komunikasi risiko di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi mahasiswa serta peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai komunikasi risiko serta *disaster risk reduction* (DRR).

1.5.2 Kegunaan Praktis

Jika dilihat dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mengevaluasi serta meningkatkan komunikasi risiko di Indonesia. Selain itu, komunikasi risiko yang baik dapat menghindari jatuhnya korban saat bencana terjadi serta menghindari situasi terburuk dari suatu bencana. Dengan komunikasi risiko yang baik, sentimen masyarakat terhadap kinerja pemerintah cenderung positif karena menghindari jatuhnya korban jiwa serta kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat secara luas dengan mengkaji seberapa jauh perkembangan komunikasi risiko di Indonesia. Dengan menemukan gap pada strategi komunikasi risiko di Indonesia, diharapkan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk bisa membuat kebijakan mengenai komunikasi risiko yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini nantinya akan berguna dalam pengembangan dan kebijakan komunikasi risiko yang efektif bagi masyarakat, sehingga dalam situasi bencana masyarakat dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika dalam kondisi tersebut.

1.6. Batasan Penelitian

Kajian ini dibatasi dengan lingkup tertentu yang dianggap paling relevan dengan mitigasi bencana. Hal ini bertujuan agar penelitian tidak mengarah ke jalan yang salah dan tetap berfokus kepada hal utama. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana perbandingan strategi komunikasi risiko dan kebijakan mengenai *disaster risk reduction* (DRR) pada lembaga BMKG di negara Indonesia.

Batasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Bencana

Jenis bencana yang dipilih adalah gempa bumi dan tsunami, hal ini didasari oleh ancaman bencana ini yang sewaktu-waktu dapat mengguncang suatu negara secara tiba-tiba. Selain itu daya rusak yang ditimbulkan oleh bencana ini sangat besar, sehingga butuh ditangani secara serius oleh pemerintah. Tidak hanya sifatnya yang destruktif, bencana ini juga menimbulkan risiko lainnya yang cukup besar yaitu bencana susulan seperti tanah longsor serta bencana lainnya yang berisiko memakan banyak korban jika tidak tangani dengan tepat.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Negara yang dipilih sebagai penelitian ini hanya negara Indonesia. Negara Indonesia dipilih karena memiliki kondisi geografis yang menantang dan sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, negara Indonesia memiliki *disaster risk reduction* (DRR) dan komunikasi risiko yang tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

1.6.3 Teori yang Dipakai

Peneliti memakai teori komunikasi risiko sebagai teori utama agar penelitian dapat terfokus kepada strategi dan penerapan dari komunikasi risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, hal ini dilakukan agar selaras dengan narasumber yang dipilih oleh peneliti. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan menambahkan teori-teori komunikasi lainnya selama teori tersebut masih berkaitan dengan topik yang diteliti.

1.6.4 Narasumber

Penulis memilih narasumber dari pihak penyelenggara negara seperti BMKG Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat berfokus terhadap langkah-langkah pemangku kebijakan mengenai strategi komunikasi risiko bencana gempa bumi.

1.6.5 Periode Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan 1 Januari 2026-20 Juni 2026, yang mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir. Pilihan waktu ini didasarkan pada keterbatasan penelitian akademik dan juga untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari lapangan benar dan dapat diandalkan sebagai acuan utama dalam menulis.

